

Joe Biden Ganti Kebijakan Donald Trump Soal Imigran

WASHINGTON (IM)- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani tiga perintah eksekutif untuk menggantikan kebijakan imigrasi di era pemerintahan Presiden Donald Trump yang kontroversial. Salah satu kebijakan yang dihapus oleh Biden adalah menyatukan kembali keluarga para migran yang terpisah di perbatasan selatan AS.

"Dengan tindakan pertama hari ini, kami akan bekerja untuk menghilangkan rasa malu moral dan nasional dari pemerintahan sebelumnya yang secara harfiah, tidak secara kiasan, merenggut anak-anak dari pelukan keluarga, ibu, dan ayah mereka di perbatasan untuk menyatukan kembali anak-anak yang masih dalam tahanan dan orang tua mereka," kata Biden dilansir Sputnik News, Rabu (3/2).

Biden mengatakan perintah eksekutif kedua yang dia tandai akan membahas akar penyebab migrasi ke perbatasan selatan AS. Biden menambahkan, tiga perintah eksekutif itu mengarahkan peninjauan penuh terhadap kebijakan imigrasi di bawah pemerintahan Trump.

Pada 2018, mantan Jaksa Agung AS Jeff Sessions mengu-

mumkan bahwa Amerika Serikat telah mengadopsi "kebijakan tanpa toleransi" untuk pelanggaran imigrasi yang mengharuskan penuntutan bagi imigran yang masuk secara ilegal di perbatasan barat daya, termasuk pelanggaran ringan. Pekan lalu Jaksa Agung AS Monty Wilkinson secara resmi menghentikan kebijakan imigrasi yang dinilai tidak memiliki toleransi tersebut. Pada 2017 lebih dari 1.000 keluarga migran terpisah.

Pada Oktober, media AS yang mengutip American Civil Liberties Union bahwa pemerintahan Trump tidak dapat mempertemukan 600 anak migran dengan orang tua mereka dalam tahanan AS. Setelah resmi dilantik menjadi presiden, Biden langsung mengambil tindakan eksekutif untuk menghentikan pembangunan tembok perbatasan yang sedang berlangsung.

Selain itu, Biden juga menangguk program Protokol Perlindungan Migran yang juga dikenal sebagai kebijakan tetap di Meksiko. Biden juga meminta pihak terkait untuk meninjau kebijakan pemerintahan Trump terkait migran. ● gul



PELANTIKAN SEKRETARIS DEPARTEMEN KEAMANAN DALAM NEGERI AS

Wakil Presiden Kamala Harris mengadakan upacara pelantikan untuk Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas sementara istrinya Tanya memegang Buku Doa Persatuan di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, Selasa (2/2).

Protes Kudeta, Para Dokter di 70 Rumah Sakit Myanmar Mogok Kerja

Para staf di 70 rumah sakit dan departemen medis di 30 kota di penjuru Myanmar menghentikan pekerjaan pada Rabu (3/2) untuk memprotes kudeta yang menggulingkan pemimpin Aung San Suu Kyi

YANGON (- Para dokter dan staf medis di Myanmar menggelar aksi mogok kerja untuk memprotes kudeta militer. Para staf di 70 rumah sakit dan departemen medis di 30 kota di penjuru Myanmar menghentikan pekerjaan pada Rabu (3/2) untuk memprotes kudeta yang menggulingkan pemimpin Aung San Suu Kyi. Aksi mogok kerja para petugas medis itu diumumkan Gerakan Pembangkangan Sipil Myanmar yang baru dibentuk setelah kudeta.

Pernyataan dari kelompok itu mengatakan para tentara telah menempatkan kepentingannya sendiri di atas populasi rentan yang menghadapi kesulitan selama pandemi virus korona.

Virus itu telah menewaskan lebih dari 3.100 orang di Myanmar, salah satu korban

tertinggi di Asia Tenggara. "Kami menolak mematuhi perintah apa pun dari rezim militer tidak sah yang menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati para pasien kami yang malang," ungkap pernyataan kelompok protes itu.

Empat dokter mengonfirmasi bahwa mereka telah berhenti bekerja, tetapi tidak ingin diidentifikasi namanya.

"Saya ingin tentara kembali ke barak mereka dan itulah mengapa kami para dokter tidak pergi ke rumah sakit," tegas seorang dokter berusia 29 tahun di Yangon kepada Reuters.

"Saya tidak memiliki kerangka waktu berapa lama saya akan terus melakukan mogok kerja ini. Itu tergantung situasinya," kata dia.

Kelompok pelajar dan pemuda juga bergabung dalam

kampanye pembangkangan sipil. Reuters tidak dapat menghubungi pemerintah untuk mengomentari tindakan para dokter tersebut.

Tentara merebut kekuasaan pada Senin, mengambil jalan pintas pada transisi demokrasi dengan dalih penipuan dalam pemilu November lalu, yang dimenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi secara takak.

Kudeta tersebut menuai kecaman dari Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat lainnya karena para jenderal yang berkuasa menaruh Suu Kyi dan puluhan pejabat tinggi lainnya.

Untuk memperkuat kekuasaannya, junta meluncurkan dewan pemerintahan baru berisi delapan jenderal dan dipimpin Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing.

Dewan itu mirip lembaga yang berkuasa di bawah junta sebelumnya yang telah memerintah Myanmar selama hampir setengah abad hingga 2011.

Peraih Nobel Perdamaian Suu Kyi, 75, tetap ditahan meski ada seruan internasional agar dia segera dibebaskan.

Seorang pejabat NLD

mengatakan dia mengetahui bahwa Suu Kyi berada dalam tahanan rumah di ibu kota Naypyidaw dan dalam keadaan sehat.

Dalam protes publik terbesar terhadap kudeta sejauh ini, orang-orang di pusat komersial Yangon meneriakkan "kejahatan pergi" dan memukul panci logam pada Selasa malam sebagai isyarat tradisional untuk mengusir kejahatan atau karma buruk.

Kudeta terbaru merupakan pukulan besar bagi harapan negara miskin berpenduduk 54 juta itu.

Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Utusan PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mendesak Dewan Keamanan untuk "secara kolektif mengirim sinyal yang jelas untuk mendukung demokrasi di Myanmar."

"Dewan Keamanan PBB sedang merundingkan kemungkinan pernyataan yang akan mengutuk kudeta tersebut, menyerukan militer menghormati aturan hukum dan hak asasi manusia, dan segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah," ujar para diplomat.

Konsensus dibutuhkan dalam dewan yang beranggotakan 15 orang untuk pernyataan semacam itu.

Tetapi seorang diplomat Tiongkok di PBB mengatakan akan sulit untuk mencapai konsensus tentang draf pernyataan tersebut. Menurut dia, tindakan apa pun harus menghindari "peningkatan ketegangan atau semakin memperumit situasi."

Selain para dokter mogok, penduduk di kota terbesar Myanmar, Yangon, ramai-ramai membunyikan klakson mobil serta memukul panci dan wajan. Hal ini merupakan perlawanan publik pertama terhadap kudeta militer di negara itu.

Penduduk di kota terbesar Myanmar, Yangon, ramai-ramai membunyikan klakson mobil serta memukul panci dan wajan pada Selasa malam. Itu merupakan perlawanan publik pertama terhadap kudeta militer di negara itu sehari sebelumnya.

"Memukul genderang dalam budaya Myanmar seperti kita mengusir setan," kata salah satu peserta aksi pukul panci yang menolak menyebutkan namanya karena takut akan pembalasan militer. ● tom

Baku Tembak dengan Tersangka Pornografi, 2 Agen FBI Tewas dan 3 Lainnya Luka

MIAMI (IM) - Dua agen FBI, Amerika Serikat (AS), tewas dan tiga lainnya terluka dalam baku tembak dengan tersangka kasus pornografi anak di Florida, Selasa. Menurut FBI, para agennya terbunuh saat menjalankan surat perintah penangkapan terhadap tersangka.

Tembakan pertama kali terdengar sekitar pukul 06.00 waktu setempat di kota Sunrise ketika para agen sedang menyelidiki kasus pelecehan anak.

Tersangka juga telah tewas, diduga akibat bunuh diri setelah baku tembak. Ditanya berapa banyak peluru yang ditembakkan, seorang petugas polisi setempat menjawab: "Terlalu banyak untuk dihitung."

Baku tembak terjadi di komunitas elite di utara Miami. Pernyataan dari FBI menyebutkan dua agen yang selamat telah dibawa ke rumah sakit dan dalam kondisi stabil. Agen ketiga yang juga terluka tidak membutuhkan perawatan rumah sakit.

Mengutip laporan Miami Herald, Rabu (3/2) tersangka dibarikade di dalam rumah selama beberapa jam sebelum menembak dan akhirnya bunuh diri.

Penembakan itu terjadi di kompleks apartemen Water Terrace, sekitar 10 mil (16km) barat laut Fort Lauderdale. Itu merupakan komunitas mewah yang memiliki gym, kolam renang, spa, dan lapangan tenis.

"Sesuai dengan kebijakan FBI, insiden penembakan itu

sedang diselidiki oleh Divisi Inspeksi FBI," kata FBI. "Proses peninjauan dilakukan secara menyeluruh dan objektif serta dilakukan secepat mungkin dalam situasi tersebut."

Direktur FBI Christopher Wray mengidentifikasi kedua agen yang tewas sebagai Dan Alfin dan Laura Schwarzenberger. Keduanya telah bekerja selama bertahun-tahun untuk memerangi pornografi anak di Florida.

"Agen Khusus Alfin dan Agen Khusus Schwarzenberger mencontohkan kepahlawanan hari ini dalam membela negara mereka," katanya. "FBI akan selalu menghormati pengorbanan terakhir mereka dan akan selamanya berterima kasih atas keberanian mereka."

Departemen Kepolisian Sunrise telah menutup beberapa jalan di daerah tersebut. Mereka telah mendesak penduduk terdekat untuk tetap di dalam rumah karena "penyelidikan yang sedang berlangsung".

Juru bicara Polisi Sunrise Otshia Browning-Smith mengatakan, "Ada terlalu banyak [tembakan] untuk dihitung."

Julius McLymont, seorang penduduk kompleks, mengatakan kepada Associated Press bahwa dia mendengar baku tembak dimulai dengan tembakan empat kali. McLymont mengatakan dia melihat petugas dengan perlengkapan SWAT mengevakuasi orang-orang yang terluka ke ambulans ketika banyak kru darurat tiba. ● gul

AS Pertimbangkan Batasi Bantuan ke Myanmar

WASHINGTON (IM)- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) akan melakukan peninjauan atas bantuan luar negerinya ke Myanmar. Pertimbangan tersebut diambil setelah pengambilalihan kekuasaan oleh militer di negara Asia itu pekan ini.

Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan AS memberikan hampir 135 juta dolar AS bantuan bilateral kepada Myanmar pada 2020. Hanya sebagian kecil total bantuan tersebut yang langsung diberikan kepada pemerintah.

Meski begitu, para pejabat sedang meninjau bantuan itu. Namun, bantuan kemanusiaan, termasuk untuk minoritas Muslim Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan di Myanmar dan program-program yang mempromosikan

demokrasi atau menguntungkan masyarakat sipil akan terus berlanjut.

"Perhatian pertama kami saat kami melakukan peninjauan itu adalah untuk memastikan bahwa kami tidak melakukan apa pun yang akan mempengaruhi orang-orang Burma yang telah lama menderita, termasuk Rohingya," kata Price dalam sebuah penjelasan singkat.

Price menyatakan, pejabat AS juga melakukan peninjauan sanksi terhadap para pemimpin militer Myanmar dan perusahaan yang terkait dengan mereka. Langkah itu sesuai dengan ancaman Presiden Joe Biden yang akan memberikan sanksi baru terhadap para jenderal yang menahani para pemimpin terpilih, termasuk Aung San Suu Kyi pada Senin (1/2) pagi. Washington belum melaku-

kan kontak langsung dengan para pemimpin kudeta di Myanmar atau para pemimpin pemerintah sipil yang digulingkan. Namun, pejabat AS mengatakan, atas permintaan Gedung Putih, perwira tinggi militer AS, Jenderal Angkatan Darat Mark Milley, berusaha menelpon militer Myanmar setelah kudeta, tetapi dia tidak dapat terhubung. Pejabat AS pun mencoba untuk bekerja dengan sekutu Eropa dan Asia yang memiliki kontak dengan militer Myanmar, tetapi tidak membuat banyak kemajuan.

Hukum AS menyatakan kudeta akan secara otomatis membatasi bantuan. Kudeta tersebut pun merupakan pukulan signifikan bagi pemerintahan Biden dan upayanya untuk membentuk kebijakan Asia-Pasifik yang kuat untuk melawan Tiongkok. ● ans



PERBATASAN AS DAN MEKSIKO

Petugas patroli perbatasan AS berjaga dekat lokasi pembangunan yang tertunda di sepanjang dinding Perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko pada bagian yang belum diselesaikan di Gunung Otay, timur San Diego, California, Amerika Serikat, Selasa (2/2).

PBB Sebut Penyiksaan dan Kerja Paksa Meluas di Penjara Korut

JENEWA (IM) Penyiksaan dan kerja paksa tersebar luas di penjara-penjara Korea Utara, yang merupakan kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan, kata Kantor Hak Asasi Manusia PBB. Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan sanksi baru atas program nuklir Pyongyang.

Laporan yang dikeluarkan tujuh tahun setelah penyelidikan penting PBB menemukan kejahatan terhadap kemanusiaan sedang dilakukan. Laporan juga mengungkap kamp penjara politik yang dijalankan oleh pasukan keamanan masih bertahan, meskipun informasinya lebih sulit diperoleh.

"Tidak hanya kekebalan hukum yang berlaku, tetapi pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan terus dilakukan," kata Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet dalam sebuah pernyataan, Selasa (2/2).

Dia mendesak kekuatan dunia untuk menuntut keadilan dan mencegah pelanggaran lebih lanjut. Laporan itu meminta Dewan Keamanan PBB untuk menunjuk Republik Demokratik Rakyat Korea ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk dituntut atau membentuk pengadilan ad hoc.

"Pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia berat dan kejahatan berkelanjutan terhadap kemanusiaan seharusnya tidak menjadi pertimbangan kedua untuk membawa Korea Utara ke meja

perundingan," kata juru bicara hak asasi manusia PBB Ravina Shamdasani kepada Reuters.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, berbicara di NBC News pada Senin (1/2), mengatakan sanksi tambahan dapat diberlakukan terhadap Korea Utara dalam koordinasi dengan sekutu AS sebagai cara menuju denuklirasi Semenanjung Korea yang terpecah.

Korea Utara menyangkal keberadaan kamp penjara politik dan Juli lalu mengecam Inggris karena mengumumkan sanksi terhadap dua organisasi dengan sekutu AS sebagai cara menuju denuklirasi Semenanjung Korea yang terpecah.

Korea Utara menyangkal keberadaan kamp penjara politik dan Juli lalu mengecam Inggris karena mengumumkan sanksi terhadap dua organisasi dengan sekutu AS sebagai cara menuju denuklirasi Semenanjung Korea yang terpecah.

Laporan PBB, mengutip wawancara dengan mantan tahanan, mengatakan pihaknya terus menerima laporan yang konsisten dan kredibel tentang penderitaan sistematis yang parah atau penderitaan fisik dan mental terhadap tahanan, melalui penderitaan pemukulan, posisi tertekan, dan kelaparan di tempat-tempat penahanan.

Ini menegakkan kembali temuan penyelidikan PBB pada 2014, yang dipimpin oleh mantan hakim Australia Michael Kirby, dan menunjukkan kejahatan terhadap kemanusiaan melalui penyiksaan terus terjadi di sistem penjara biasa. Kerja paksa yang mungkin merupakan kejahatan perbudakan terhadap kemanusiaan juga berlanjut di penjara, demikian isi laporan PBB tersebut. ● gul



KENDARAAN TENTARA MYANMAR

Kendaraan bersenjata Tentara Myanmar berkendara melewati sebuah jalan setelah mereka mengambil kekuasaan dalam sebuah kup di Mandalay, Myanmar, Selasa (2/2).